

**PROSES PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM
KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2014
(Studi kasus di Kecamatan Bojongsoang Daerah Pemilihan III
Kabupaten Bandung)**

Oleh:

Emi Rachmawati

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Langlangbuana

Email: e.rachmawati26@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan politik bagi masyarakat merupakan hal yang sangat menarik untuk diketahui. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya secara sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh bagi setiap warganegara dalam rangka membentuk warganegara yang baik (*good citizen*) yaitu warganegara yang melek politik (*political literacy*), memiliki kesadaran politik (*political awareness*), dan berpartisipasi dalam kehidupan politik (*political participation*) secara cerdas dan bertanggung jawab. Seperti yang di sebutkan dalam pasal 31 UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada gilirannya akan mendorong ke arah terbangunnya etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Pendidikan politik akan mempengaruhi perilaku politik masyarakat dan perilaku politik itu pada akhirnya akan mewarnai perilaku sosio-kultural masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan politik terletak pada perilaku sosio-kultural masyarakat itu sendiri. Semakin konstruktif perilaku sosio-kultural maka semakin efektif pendidikan politik yang di selenggarakan.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Kampanye Politik

ABSTRACT

Political education of the people is always very interesting to know. Through this process, community members recognize and learn the values, norms, and symbols of the country's political parties in the political system such as schools, government and political parties. Political education teaches people to become more familiar with its political system in a systematic, continuous and comprehensive way. Its goals are to establish good citizens who are politically literate, have a political consciousness and also participate in political life intelligently and responsibly. As mentioned in article 31 of Law No. 2 of 2008 on political parties, political education is a process of learning

and understanding of the rights, obligations and responsibilities of every citizen in the life of the nation, which in turn will lead to the establishment of ethics and political culture in accordance with Pancasila. Political education will affect people's political behavior and that eventually will characterize the behavior of the socio-cultural community. One indicator of the success of political education lies in the socio-cultural behavior of the people themselves. The more constructive socio-cultural behavior, the more effective political education was held.

Keywords: *Political Education, Political Campaign*

PENDAHULUAN

Partai Politik dan Pemilu memiliki keterkaitan yang erat di mana keterkaitan tersebut akan secara langsung mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Disinilah diperlukan adanya pendidikan politik kepada masyarakat khususnya oleh partai politik melalui calon anggota legislatif yang mewakilinya.

Partai politik sebagai pemain pada barisan terdepan berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Sedangkan pendidikan politik disini bukan hanya dimaknai sebagai proses sepihak ketika partai politik memobilisasi dan memanipulasi rakyat untuk menerima nilai, norma, maupun simbol yang dianggapnya ideal dan baik, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik totaliter.

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang terkait dengan perjuangan partai politik tersebut kepada konstituennya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Fenomena umum yang terjadi dewasa ini menunjukkan gejala masyarakat yang cenderung jenuh dan apatis, tidak menganggap pentingnya sebuah partai sebagai salah satu institusi yang di butuhkan di dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagai salah satu contoh bahwa masyarakat apatis

adalah tingginya angka apatisme politik warga (golput).

Menurut hasil pemilu tahun 2014 di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Bandung ini merupakan salah satu kecamatan dengan katagori rawan kampanye dalam pemilu legislatif. Wilayah Kecamatan Bojongsoang banyak berdiri pabrik-pabrik dan merupakan basis dari masing masing partai politik peserta.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) selain rawan pelanggaran, ketiga wilayah tersebut juga berpotensi terjadi konflik antar pendukung parpol.

Hasil pengamatan pada saat menjelang pemilihan anggota legislatif pada pemilu tahun 2014 ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

1. Adanya pemahaman masyarakat tentang politik yang rendah yang disebabkan karena latar belakang pendidikan mayoritas tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga kondisi ekonomi menengah ke bawah, menjadikan masyarakat rentan terhadap upaya mobilisasi politik maupun terpaan *money*

politic dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif.

2. Apatisme yang tinggi terhadap proses politik sehingga tidak memilih partai politik maupun calon anggota legislatif yang mewakilinya. Hal ini disebabkan karena masyarakat berfikir apapun/ siapapun partai politik yang menang tidak akan ada perubahan yang signifikan bagi kehidupan mereka.
3. Adanya kecenderungan sikap negatif masyarakat terhadap partai politik maupun kandidat yang diusungnya yang disebabkan karena janji politik ketika kampanye sering tidak terealisasi.

Permasalahan yang ada menunjukkan bahwa partai politik melalui calon anggota legislatif yang mewakilinya belum dapat menyelenggarakan pendidikan politik yang ideal bagi masyarakat. Tumbuh-kembangnya demokrasi, tentu akan tergantung pada proses dan kemampuan partai politik maupun calon anggota legislatif dalam mewujudkan pendidikan politik yang cerdas bagi masyarakat. Pendidikan politik dimaksudkan agar masyarakat tak lagi

jadi obyek yang didominasi untuk keperluan sesaat parpol. Lebih dari itu, pendidikan politik kepada masyarakat diharapkan bisa mengubah cara berpikir yang lama menuju pemikiran masyarakat yang baru. Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dirumuskan masalah :

1. Bagaimana pendidikan politik yang dilakukan oleh calon legislatif di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Daerah pemilihan III Kabupaten Bandung.
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pendidikan politik yang dilakukan oleh calon legislatif di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Daerah pemilihan III Kabupaten Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah sosialisasi politik (*political socialization*). Oleh karena itu, dengan menggunakan Dengan kata lain, sosialisasi politik

adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Menurut Surbakti (1999), dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

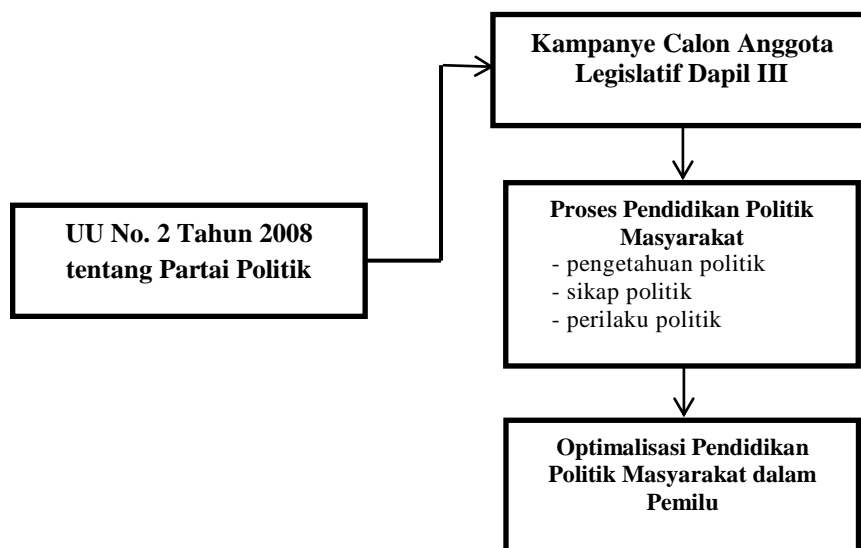
Alfian (1981) mengatakan bahwa pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Substansi kurikulum pendidikan politik menurut Brownhill dan Smart (1989) terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Pengetahuan, yang terdiri dari pengetahuan profesional, pengetahuan praktikal dan pemahaman.
2. Keterampilan, yang terdiri dari keterampilan intelektual,

keterampilan tindakan dan keterampilan komunikasi.

3. Sikap dan nilai-nilai prosedural.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan model kerangka pemikiran seperti di gambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif melalui metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan dapat dicapai. Chaedar (2003) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak berangkat dari teori,

tetapi berangkat dari kasus atau pengalaman.

PEMBAHASAN

Pendidikan Politik Masyarakat

Dalam pelaksanaan kampanye calon legislatif di Daerah Pemilihan III Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, proses pendidikan politik masyarakatnya dilakukan analisis

melalui pendekatan aplikasi teori pendidikan politik dengan melakukan cara-cara pemberian pengetahuan politik dan sikap politik

Pemberian pengetahuan politik para calon legislatif atau partai politik tidak secara khusus memfokuskan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya politik. Fokus kampanye yang lebih sering disuarakan oleh calon legislatif adalah tentang masalah ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat marjinal.

Calon legislatif terlalu fokus pada ambisinya untuk menjadi anggota parlemen sehingga mereka lupa bahwa yang terpenting dalam proses kampanye yaitu memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak banyak menerima pengetahuan tentang arti pentingnya pemilu. Masyarakat digiring untuk ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya dengan informasi yang didapatkan hanya melalui selebaran, poster, dan media cetak saja.

Sikap Politik

Sikap masyarakat di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung pada saat mengikuti kampanye pemilu

legislatif Dapil III pada umumnya ialah dengan mengikuti kampanye dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para calon legislatif (caleg). Ada tidaknya perubahan dari masyarakat tergantung dari isi kampanye dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat atau tidak. Masyarakat akan memilih caleg tersebut kalau isi kampanye bisa menyentuh hati masyarakat yang mempunyai faham dan ideologi sama serta meyakini caleg tersebut akan menjadi wakilnya di parlemen.

Mengenai perilaku masyarakat dalam berpolitik di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, ada beberapa faktor yang menjadi dasar mereka berpartisipasi, yaitu di antaranya:

1. Faktor ekonomi.

Masyarakat mau berpartisipasi apabila ada iming-iming uang (transaksional).

2. Kesadaran dan kemauan untuk berpolitik:

Keacuhan berpolitik adalah akibat politik yang dijadikan sandaran masyarakat hanya menjadi catatan tanpa jadi kenyataan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pendidikan Politik Masyarakat

Dasar Hukum proses pendidikan politik masyarakat adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD yang mengatur beberapa perubahan pokok tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan tahapan penyelenggaraan Pemilu,
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 4 Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlunya proses pendidikan politik diperlukan antara lain karena:

1. Kajian kampanye komunikasi secara teoritis bertujuan untuk memberi informasi dan

mempengaruhi masyarakat merupakan bagian yang dikenal dan tidak dapat dipisahkan dari program pelayanan masyarakat, antara lain dalam bentuk berbagai poster, pemberitaan majalah, iklan di televisi, radio, komunikasi dengan pemuka masyarakat, dan selebaran selebaran. Kampanye komunikasi itu mempunyai tujuan untuk memberitahu, membujuk dan memotivasi perubahan perilaku khalayak.

2. Masyarakat sebenarnya belum mendapatkan pendidikan politik yang ideal dari para politisi yang sekarang menjadi pemimpin maupun wakilnya di parlemen.

Sedangkan hal-hal yang dianggap menghambat dalam proses pendidikan politik masyarakat antara lain:

1. Faktor non teknis, yaitu sulitnya calon legislatif masuk ke suatu daerah yang seakan sudah di klaim milik partai tertentu. Hal ini menggambarkan seolah-olah masyarakat sudah dikotak-kotakan milik partai tertentu.
2. Letak geografis yang sulit di jangkau khususnya masyarakat

yang berada jauh di pelosok sering tidak tersentuh langsung oleh calon legislatif ataupun partai politik.

3. Kejenuhan masyarakat terhadap pemilu karena seringnya pemilu digelar mulai dari pemilihan Kepala Daerah, pemilu legislatif, pemilihan Kepala Desa bahkan sampai pemilihan RT/RW.
4. Masyarakat yang pragmatis tanpa didasari kesadaran untuk ikut berpartisipasi. Kondisi demikian bisa memicu tingginya angka golput.
5. Masyarakat yang berada di Kecamatan Bojongsong kebanyakan mempunyai latar belakang pendidikan hanya tamatan SMP, maka pemahaman politiknya kurang baik. Selain itu dengan kondisi masyarakat yang sebagian berada pada kondisi menengah kebawah maka kecenderungan yang ada adalah kerentanan dengan terpaan *money politic*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik

masyarakat pada penyelenggaraan Kampanye Pemilu legislatif di Dapil III Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung masih jauh dari harapan masyarakat. Analisis melalui pendekatan teori pendidikan politik dari Brownhill dan Smart, (1989) menunjukkan bahwa:

1. Pendidikan politik yang diberikan oleh calon anggota legislatif atau partai politik tidak secara khusus memfokuskan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya politik. Fokus kampanye yang lebih sering disuarakan oleh calon legislatif adalah tentang masalah ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat marjinal. Dalam kampanye calon legislatif dari beberapa calon legislatif lebih banyak berisi ajakan untuk mendukung dirinya menjadi anggota legislatif.
2. Pada konteks Sikap Politik, pendidikan politik yang diberikan oleh calon anggota legislatif kepada masyarakat pada saat menghadapi kampanye, menghasilkan dua jenis sikap masyarakat yakni sikap positif dan negatif. Masyarakat yang memiliki sikap positif

terhadap pendidikan politik pada umumnya merespon tergantung pemahamannya terhadap isi kampanye yang disampaikan oleh calon legislatif. Adapun masyarakat yang bersikap negatif pada umumnya disebabkan oleh penilaian negatif terhadap kapabilitas maupun cara penyampaian materi kampanye calon legislatif.

3. Pada konteks Perilaku Politik masyarakat sebagai dimensi dari pendidikan politik dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan kampanye. Masyarakat pada kategori ekonomi menengah keatas responnya cenderung positif atau aktif meneruskan kembali informasi yang didapatkan ketika hadir dalam undangan sosialisasi dalam usaha meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik. Masyarakat menengah ke bawah cenderung pasif dan cenderung tidak menindak-lanjutnya.
4. Upaya yang dilakukan calon legislatif untuk mengatasi hambatan

dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat antara lain:

- a. Mengadakan simulasi pemilu dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat.
- b. Merangkul tokoh, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang berpengaruh.
- c. Membuka tingkat partisipasi masyarakat selebar-lebarnya melalui pendekatan faktual, historis dan teoritis.
- d. Kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat dikemas semenarik mungkin.

Saran

1. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam hal ini peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik, seyogyanya para calon anggota legislatif bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten dalam memberikan pengetahuan politik khusus kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui hak dan kewajiban warga negara jauh sebelum masa kampanye Pemilihan Umum legislatif.

2. Untuk mengatasi masalah kurangnya tingkat partisipasi pada pemilih melalui pendidikan politik, sebaiknya para calon legislatif lebih giat melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan semua agen sosial yang terkait (seperti LSM, Media cetak dan elektronik ataupun tenaga pengajar pendidikan) secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat menghadapi Pemilihan Umum saja.
3. Dalam usaha untuk mencapai optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik. Hal ini diperlukan agar bisa menghadapi berbagai tantangan seperti budaya sosial daerah setempat yang selama ini cenderung jenuh pada pelaksanaan pemilu dengan segala konflik dan konstalasi politik yang senantiasa mengikuti setiap kegiatan tersebut.
4. Sumber daya manusia yang berkualitas juga diharapkan dapat memberikan pola-pola baru dalam sosialisasi pendidikan politik dengan kemasan yang menarik bagi masyarakat, misalnya dengan dialog interaktif atau kuis. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi masyarakat bahwa politik itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik untuk bisa dikenal, dipelajari dan digali.
5. Seyogyanya adanya dukungan finansial yang mencukupi karena kegiatan dalam rangka pendidikan politik terhambat dengan anggaran yang kurang bisa mendukung semua program sosialisasi yang telah dicanangkan.
6. Seyogyanya aktivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh calon legislatif maupun partai politik dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat menjadi paham dan lebih mengerti tentang politik yang berujung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (1981), *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Alwasilah. C. (2003). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.

Brownhill, R. & Smart, P. (1989).
Political Education. London and
New York: Routledge

Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu
Politik*. Jakarta: PT Gramedia
Widiasarana Indonesia

Dokumen dan Sumber Lain

Undang-Undang Republik Indonesia
No.2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum anggota
DPR, DPRD dan DPD